

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 303 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PACET
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pacet untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pacet untuk periode 1 (satu) tahunan.

15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP
RENSTRA KECAMATAN PACET

Pasal 2

Dokumen Renstra Kecamatan Pacet merupakan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Pacet untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pacet yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Pacet yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Kecamatan Pacet bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pacet dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Kecamatan Pacet dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Kecamatan Pacet agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Kecamatan Pacet;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Pacet;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Kecamatan Pacet.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA KECAMATAN PACET

Pasal 4

(1) Renstra Kecamatan Pacet Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kecamatan Pacet dalam menyusun Renja Kecamatan Pacet.

(2) Renstra Kecamatan Pacet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
   1. latar Belakang;
   2. dasar hukum penyusunan;
   3. maksud dan tujuan; dan
   4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Kecamatan Pacet paling sedikit memuat:
   1. gambaran pelayanan Kecamatan Pacet; dan
   2. permasalahan dan isu strategis Kecamatan Pacet.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
   1. tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pacet Tahun 2025-2029;
   2. strategi Kecamatan Pacet dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
   3. arah kebijakan Kecamatan Pacet dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
   1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
   2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Kecamatan Pacet; dan
4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
1. kesimpulan;
2. kaidah pelaksanaan; dan
3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Kecamatan Pacet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KECAMATAN PACET

Pasal 5

(1) Kecamatan Pacet melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Pacet dan evaluasi hasil Renstra Kecamatan Pacet sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.

(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Kecamatan Pacet terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Pacet.

(3) Camat Pacet menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Kecamatan Pacet.

(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN PACET

Pasal 6

Perubahan Renstra Kecamatan Pacet dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Kecamatan Pacet mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra Kecamatan Pacet dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan
c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Kecamatan Pacet, maka Renstra Kecamatan Pacet dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Kecamatan Pacet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Kecamatan Pacet Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Kecamatan Pacet terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Kecamatan Pacet.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.

(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 303

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 302 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PACET
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PACET
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PACET TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PACET
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Renstra ini dilandasi oleh amanat peraturan perundang-undangan**,** terutama Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Inmendagri ini memberikan panduan teknis yang baku dan terstandarisasi untuk memastikan bahwa perencanaan di level Kecamatan Pacet selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mendukung pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dengan mengacu pada Inmendagri ini, Renstra Kecamatan Pacet disusun dengan prinsip yang holistik, integratif, dan berbasis kinerja.

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum. Berdasarkan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis baik dari tugas, pokok dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan pada hakikatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi Kecamatan yang menentukan strategi atau arah kebijakan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan, keterkaitan Renstra dengan RPJMD yang secara teknis

Renstra merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Daerah. Renstra Kecamatan sendiri berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang yang ada di Kecamatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Kecamatan Pacet sebagai bagian dari Wilayah Kabupaten Bandung menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan menyesuaikan terhadap Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029 yang mendukung terhadap pencapaian Visi Kabupaten Bandung Periode 2025 - 2029 yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas” yang kemudian dirumuskan pada Dokumen Renstra ini menjadi Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dengan Target Capaian Kinerja berupa Indikator Kinerja Utama (IKU).

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pacet Tahun 2025 - 2029 disusun berdasarkan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Target yang akan dicapai, yang mengacu kepada sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029 Kabupaten Bandung.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pacet tahun 2025-2029, peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum penyusunan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 100);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 39);
20. Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pacet Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Kecamatan Pacet Tahun 2025 - 2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan jangka menengah bagi Kecamatan Pacet dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik selama periode lima tahun. Renstra ini menjadi dasar dalam penyusunan Renja tahunan serta instrumen pengukuran kinerja kecamatan yang terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Tahun Anggaran 2025 - 2029 Kecamatan Pacet, sebagai berikut:

a. Mewujudkan perencanaan pembangunan wilayah kecamatan yang terarah, terpadu, terukur, dan berkesinambungan, sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah;

b. Menyediakan acuan bagi penyusunan Renja Kecamatan setiap tahun dalam periode 2025–2029 agar tetap selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD);

c. Menjabarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah ke dalam program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Kecamatan Pacet;

d. Menjadi dasar evaluasi kinerja kecamatan berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan, guna menjamin akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan.

Rencana Strategis Kecamatan Pacet Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan paling sedikit memuat:

1. latar Belakang;
2. dasar hukum penyusunan;
3. maksud dan tujuan; dan
4. sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

KECAMATAN PACET

Bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Kecamatan Pacet paling sedikit memuat:

1. gambaran pelayanan Kecamatan Pacet; dan
2. permasalahan dan isu strategis Kecamatan Pacet.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PACET

Bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:

1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pacet Tahun 2025-2029;
2. Strategi Kecamatan Pacet dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
3. Arah kebijakan Kecamatan Pacet dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENG GARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidan g urusan paling sedikit memuat:

1. Uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
2. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025 -2029 melalui indikator kinerja utama Kecamatan Pacet;
4. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci;
5. Inovasi Kecamatan Pacet.

BAB V PENUTUP

Bab V penutup paling sedikit memuat:

1. kesimpulan;
2. kaidah pelaksanaan; dan
3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PACET

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Pacet

Kecamatan Pacet merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan kewilayahan. Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 66 Tahun 2016. Kecamatan Pacet memiliki tugas pokok sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, koordinasi pemberdayaan Masyarakat, penegakan peraturan daerah, pemeliharaan sarana-prasarana, pelayanan umum, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan desa.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Pacet

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat. Kecamatan Pacet merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung. Kecamatan Pacet dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 perubahan kedua atas peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa Kecamatan Pacet terdiri atas :

1. Camat

   Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi:

   a. Perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
   b. Penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat,

ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;

c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja kecamatan.

2. Sekertaris Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta, evaluasi dan pelaporan. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
b. Pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
c. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;

3. Seksi Pemerintahan.

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerinta han;
c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemerintahan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Pemberdayaan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

6. Kepala Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Pembangunan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembangunan;
b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembangunan;
c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pembangunan.

7. Kepala Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sosial Budaya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sosial Budaya;

b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sosial Budaya;
c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sosial Budaya.

8. Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan rencana dan program serta pengelolaan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Subbagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Kecamatan dan Daerah;
b. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk penyusunan dan penetapan rencana kerja Kecamatan;
c. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk penyusunan tugas dan fungsi Kecamatan;
d. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan
Keuangan Kecamatan;
f. Pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Kecamatan;
g. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan; dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan.

9. Subbagian Umum dan Kepegawaian

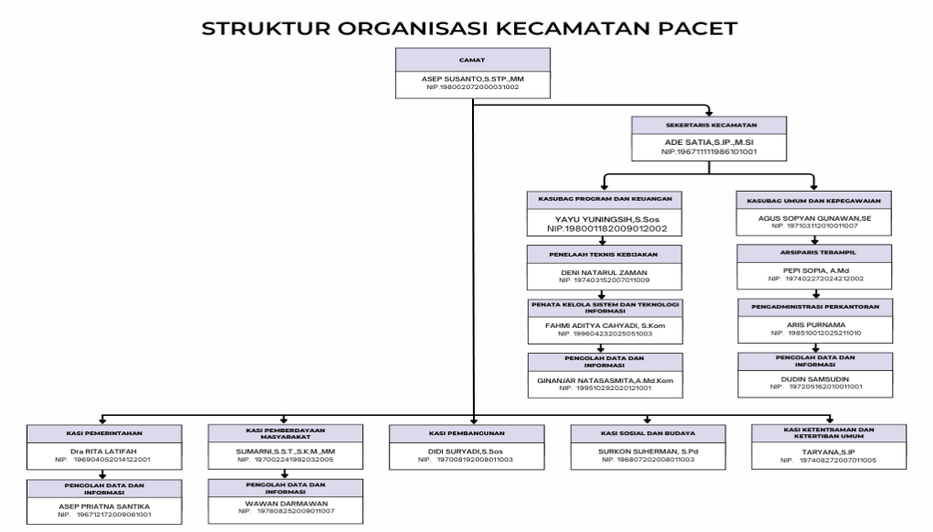
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
b. pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk penyusunan dan penetapan tugas dan fungsi Kecamatan;
b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan,perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
a. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan kecamatan secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya sertadisesuaikan dengan kebutuhan.

Gambar 2. 1 Struktur organisasi



Sumber : Hasil olahan Kecamatan Pacet, 2025

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Pacet

Kecamatan Pacet memiliki sumber daya yang terdiri dari penyediaan sumber daya manusia berdasarkan jenis kelamin, pangkat/ golongan, tingkat Pendidikan, jenis pendidikan yang di ikuti baik Pendidikan formal dan non formal serta penyediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang penyelenggaraan kegiatan pelayanan yang diberikan untuk masyarakat di Wilayah Kecamatan Pacet.

a. Sumber Daya Manusia Kecamatan Pacet

Kecamatan Pacet dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung oleh 23 orang pegawai, terdiri dari 15 orang tenaga PNS, 1 Orang Tenaga P3K, 7 Orang Tenaga Non ASN dengan Perjanjian Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 107 Tahun 2019 tentang Tenaga Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2019 Tentang Tenaga non ASN dan selain itu ditambah tenaga LINMAS dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 2. 1 Pendidikan Pegawai Kecamatan Pacet

No	Pendidikan	Status Kepegawaian						Jumlah
		PNS		CPNS		P3K		
		L	P	L	P	L	P	
1	SD	0	0	0	0	0	0	0%
2	SMP	0	0	0	0	0	0	0%
3	SMA	4	0	0	0	1	0	5
4	D3	1	0	0	0	0	1	2
5	S1	4	2	1	0	0	0	7
6	S2	2	1	0	0	0	0	3
Jumlah		11	3	1	0	1	1	17

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Pacet, 2025

Tabel 2. 2 Golongan Pegawai Kecamatan Pacet

No.	Golongan	Status Kepegawaian				Jumlah
		PNS		P3K		
		L	P	L	P	
1	Gol I	1	-	-	-	0
2	Gol II	4	-	-	-	0
3	Gol III	6	3	-	-	9
4	Gol IV	2	-	-	-	2
	Jumlah	13	3	-	-	16

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Pacet, 2025

b. Sumber Daya Aset

Dalam penyelenggaraan peningkatan pelayanan publik sangat diperlukannya akan ketersediaan saranan dan prasarana yang mendukung kinerja pemerintahan daerah dalam pelaksanaan kewajibannya sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Adapun dukungan sarana dan prasarana perangkat daerah terangkum dalam penetapan Berita Acara Rekonsiliasi Aset Periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 3 Sarana dan Prasarana Kecamatan Pacet

No	Jenis Barang	No	Jenis Barang	No	Jenis Barang
1	Gedung Kantor Utama	12	Komputer Desktop	23	CCTV
2	Ruang Kerja Camat	13	Laptop	24	WiFi
3	Ruang Sekretariat	14	Printer	25	PABX
4	Ruang Rapat	15	Scanner	26	Water Dispenser
5	Ruang Pelayanan Masyarakat	16	Proyektor	27	Lemari Es
6	Ruang Arsip	17	Mesin Fax	28	Sound System
7	Ruang Server	18	Telepon	29	Papan Informasi
8	Mushola	19	Kendaraan Dinas	30	Filing Cabinet
9	Toilet/Kamar Mandi	20	AC	31	Pos Penjagaan
10	Gudang	21	Meja Kerja		
11	Kantor Satpol PP	22	Kursi Kerja		

Sumber : Hasil analisis kecamatan pacet,2025

Tabel 2. 4 Hasil Rekonsiliasi Aset Periode 1 Januari – 31 Desember 2024

NO	URAIAN	Laporan BMD pengguna Barang (RP)	Sesuai (√)	Tidak Sesuai (√)	Keterangan
A.	ASET LANCAR	1.807.100,00			
	Persediaan	1.807.100,00			
B.	ASET TETAP	1.640.187.564,00			
	Tanah	63.000.000,00			
	Peralatan dan Mesin	1.780.107.337,00			
	Gedung dan Bangunan	1.863.179.100,00			
	Jalan,Jaringan dan Irigasi	164.261.000,00			
	Aset Tetap Lainnya	-			
	Kontruksi Dalam Pengerjaan	-			
	Akumulasi Penyusutan	2.230.359.873,00			
C.	ASET TETAP LAINNYA	180.403.700,00			
AC	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-			
	Aset Tidak Berwujud	-			
	Aset Lain-lain	180.403.700,00			
	Akumulasi Amortisasi asset tidak berwujud	-			
	Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	-			
	TOTAL	1.822.398.364,00	√		

Sumber : Hasil analisis kecamatan pacet,2025

c.Potensi Kecamatan

Kecamatan Pacet merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bandung yang memiliki potensi besar dalam berbagai sektor pembangunan. Secara geografis, Pacet terletak di wilayah selatan Kabupaten Bandung dan berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan lainnya, termasuk daerah pegunungan di Kabupaten Garut. Lokasinya yang strategis dengan topografi

perbukitan serta iklim yang sejuk memberikan keuntungan tersendiri, khususnya dalam pengembangan sektor pertanian dan pariwisata.

Dari sisi sumber daya alam (SDA), Pacet dikenal sebagai salah satu lumbung hortikultura di Kabupaten Bandung. Komoditas seperti sayur-sayuran (kubis, tomat, cabai), tanaman pangan (jagung, kacang tanah), serta praktik budidaya inovatif seperti *minapadi* (padi dan ikan dalam satu lahan) menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Keberadaan sumber air, sungai, dan kawasan hutan juga menjadi aset penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan mendukung sektor ekonomi lainnya.

Dalam bidang ekonomi dan UMKM, sebagian besar masyarakat Pacet menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Namun, terdapat pula usaha mikro, kecil, dan menengah yang berkembang di bidang olahan pangan, kerajinan, dan perdagangan lokal. Dengan dukungan teknologi, pelatihan, serta akses pasar yang lebih luas, sektor ini memiliki potensi untuk tumbuh signifikan.

Sektor pariwisata di Kecamatan Pacet juga mulai menunjukkan geliat positif. Keindahan alam, seperti air terjun Curug Roda dan lanskap pegunungan, menjadi daya tarik yang belum sepenuhnya tergarap. Rencana pengembangan wisata alam berbasis masyarakat membuka peluang besar untuk meningkatkan pendapatan desa sekaligus melestarikan lingkungan dan budaya lokal.

Dari segi infrastruktur, Kecamatan Pacet terus mengalami peningkatan, baik dari aspek jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, hingga layanan kesehatan. Meski demikian, masih terdapat desa-desa yang membutuhkan penguatan infrastruktur pendukung, terutama akses jalan menuju lahan pertanian dan objek wisata.

Dalam aspek sosial dan budaya, masyarakat Pacet dikenal memiliki semangat gotong royong yang tinggi, serta menjaga nilai-nilai adat dan budaya lokal. Kegiatan kemasyarakatan, seni tradisional, dan kearifan lokal menjadi modal sosial penting dalam memperkuat identitas dan membangun kebersamaan.

Secara keseluruhan, Kecamatan Pacet memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi wilayah yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Dengan pengelolaan yang tepat dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, Pacet dapat menjadi

contoh kecamatan yang mampu mengoptimalkan potensi alam dan manusianya secara berkelanjutan.

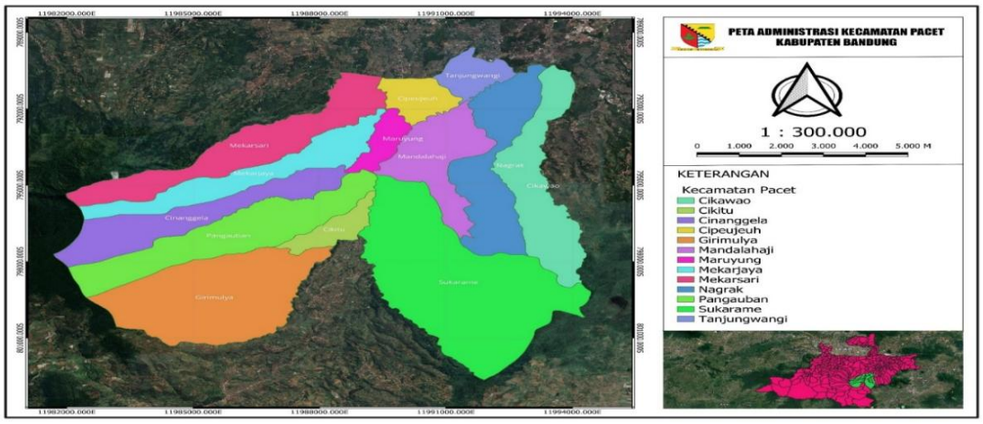
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Pacet.

Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke depan berdasarkan profil kinerja Kecamatan Pacet dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi di masa depan. Proyeksi ke depan Kecamatan Pacet adalah terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang didukung oleh sarana dan prasarana teknologi, Sumber Daya Manusia yang trampil, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan pembangunan di segala bidang. Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarannya. Kelemahan adalah situasi dan ketidak mampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Faktor internal yang ada pada Kecamatan Pacet adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan / sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk di dalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanan tupoksi. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik.

2.1.3.1 Data-Data dan Informasi Terkait Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Pacet

Kecamatan Pacet dibentuk pada tahun 1974 terletak di sebelah Selatan Kabupaten Bandung, mempunyai luas wilayah 9.748,961 Hektar.

Gambar 2. 2 Peta Administrasi Kecamatan Pacet



Sumber : Hasil olahan Kecamatan Pacet,2025

Secara administratif Kecamatan Pacet berbatasan dengan :

Batas Utara: Kec. Majalaya

Batas Timur : Kec. Ibun

Batas Selatan: Kec. Kertasari

Batas Barat: Kec. Ciparay

Kecamatan Pacet saat ini membawahi 13 Desa yaitu:

1. Cikitu
2. Cikawao
3. Cinanggela
4. Girimulya
5. Maruyung
6. Mekarjaya
7. Mandalahaji
8. Mekarsari
9. Maruyung
10. Nagrak
11. Pangauban
12. Sukarame
13. Tanjungwangi

Data demografi Kecamatan Pacet mencerminkan jumlah penduduk, sebaran jenis kelamin, serta komposisi usia yang menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan. Informasi ini tidak hanya menggambarkan kondisi terkini, tetapi juga menjadi acuan dalam memproyeksikan kebutuhan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan program pemberdayaan masyarakat lima tahun ke depan.

Tabel 2. 5 Rekapitulasi Jumlah Penduduk

Desa	Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Cikitu	3.973	3.816	7.789
Girimulya	3.662	3.375	7.037
Sukarame	3.328	3.143	6.471
Cikawao	6.093	5.562	11.655
Nagrak	7.018	6.510	13.528
Mandalahaji	7.318	6.873	14.191
Maruyung	8.416	7.968	16.384
Pangauban	6.927	6.502	13.429
Cinanggela	2.586	2.450	5.036
Mekarjaya	4.459	4.212	8.671
Mekarsari	4.659	4.236	8.895
Cipeujeuh	3.586	3.435	7.021
Tanjungwangi	3.433	3.279	6.712
Kecamatan Pacet	65.458	61.361	126.819

Sumber: GIS Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, 2025

Berdasarkan data penduduk Kecamatan Pacet, terlihat bahwa total jumlah penduduknya adalah 126.819 jiwa, yang terdiri dari 65.458 jiwa penduduk laki-laki dan 61.361 jiwa penduduk perempuan. Dari angka ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat kecenderungan jumlah penduduk laki-laki yang lebih banyak dibandingkan perempuan di kecamatan ini.

Desa Maruyung merupakan desa dengan populasi tertinggi, yaitu 16.384 jiwa. Di sisi lain, Desa Cinanggela memiliki populasi terendah, yaitu hanya 5.036 jiwa. Selisih jumlah penduduk antara desa terpadat dan terjarang ini cukup signifikan, lebih dari tiga kali lipat.

Desa-desa dengan jumlah penduduk di atas rata-rata (sekitar 10.568 jiwa per desa) antara lain Nagrak, Mandalahaji, Maruyung, Pangauban, dan Cikawao. Sementara itu, desa-desa seperti Cikitu, Girimulya, Sukarame, Cinanggela, Mekarjaya, Mekarsari, Cipeujeuh, dan Tanjungwangi memiliki jumlah penduduk di bawah rata-rata. Pola ini menunjukkan bahwa sebaran penduduk di Kecamatan Pacet tidak merata, dengan beberapa desa menjadi pusat konsentrasi penduduk.

Tabel 2. 6 Rekapitulasi Tingkat Pendidikan Kecamatan Pacet

No	Nama Desa	Tidak/Belum Sekolah	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SMA	Diploma	S1	S2/S3
1	Cikawao	405	1,200	950	1,350	300	450	75
2	Cikitu	540	1,550	1,100	1,500	350	500	50
3	Cinanggela	495	1,400	1,050	1,400	400	600	100
4	Cipeujeuh	630	1,800	1,300	1,800	450	550	40
5	Girimulya	360	950	800	1,200	350	700	150

No	Nama Desa	Tidak/Belum Sekolah	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SMA	Diploma	S1	S2/S3
6	Mandalahaji	450	1,300	1,100	1,600	500	750	110
7	Maruyung	720	2,000	1,500	2,000	400	400	25
8	Nagrak	270	750	650	1,100	450	900	200
9	Tanjungwangi	380	1,150	900	1,250	280	180	40
10	Mekarjaya	350	950	750	1,100	250	220	45
11	Sukarame	540	1,500	1,200	1,700	500	600	80
12	Pangauban	420	1,050	820	1,050	210	180	30
13	Mekarsari	320	980	780	1,100	250	200	60

Sumber: GIS Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, 2025

Kecamatan Pacet memiliki populasi anak usia 0-17 tahun sebanyak 24.200 anak yang memerlukan perhatian khusus dalam hal kesehatan, pendidikan dan perlindungan. Dengan fokus pada penurunan stunting, peningkatan partisipasi pendidikan, dan penguatan sistem perlindungan anak, diharapkan dapat terwujud pemenuhan hak anak yang optimal di Kecamatan Pacet.

Tabel 2. 7 Rekapitulasi Anak Usia 0-17 Tahun

No	Nama Desa	0-4 Tahun	5-9 Tahun	10-14 Tahun	15-17 Tahun
1	Cikawao	580	620	570	510
2	Cikitu	690	730	680	600
3	Cinanggela	670	710	660	580
4	Cipeujeuh	800	850	790	700
5	Girimulya	550	580	540	480
6	Mandalahaji	720	760	710	630
7	Maruyung	920	980	910	810
8	Mekarjaya	480	510	470	420
9	Mekarsari	430	460	420	380
10	Nagrak ,	510	540	500	450
11	Pangauban	450	480	440	390
12	Sukarame	590	630	580	520
13	Tanjungwangi	530	560	520	470

Sumber: Konvergensi Bangda Kementerian Dalam Negeri, 2025

Kecamatan Pacet mengalami pertumbuhan penduduk yang stabil dan sehat dengan rata-rata 0.81% per tahun. Pola pertumbuhan ini menunjukkan wilayah yang memiliki daya tarik dan potensi perkembangan yang baik. Perencanaan yang matang diperlukan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ini diikuti dengan peningkatan kualitas hidup yang merata bagi seluruh penduduk.

Tabel 2. 8 Jumlah dan Rata-Rata Laju Pertumbuhan Tahun 2019-2025

Jumlah Penduduk (Jiwa)							Rata Rata Laju Pertumbuhan
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	0.81%
52,500	52,900	53,250	53,700	54,200	54,650	55,100	

Hasil analisis Kecamatan Pacet, 2025

Data jumlah penduduk dari tahun 2019 hingga 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dan stabil. Pada tahun 2019, jumlah penduduk tercatat sebanyak 52.500 jiwa dan secara bertahap meningkat menjadi 55.100 jiwa pada tahun 2025.

Selama periode tujuh tahun tersebut, total terjadi penambahan penduduk sebanyak 2.600 jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun dalam periode ini adalah 0,81%, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhannya tergolong rendah dan terkendali.

Dari tahun ke tahun, kenaikan jumlah penduduk bersifat fluktuatif meski selalu positif. Kenaikan absolut tertinggi terjadi antara tahun 2022 dan 2023, yaitu sebanyak 500 jiwa (dari 53.700 menjadi 54.200). Sementara itu, kenaikan terendah terjadi pada periode awal, antara tahun 2020 dan 2021, yaitu sebesar 350 jiwa dari 52.900 menjadi 53.250.

Berikut adalah proyeksi penduduk Kecamatan Pacet untuk tahun 2026-2029, dengan laju pertumbuhan yang konsisten sebesar 0,81% per tahun. Ini menggunakan pendekatan laju pertumbuhan rata-rata tahunan, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih terarah.

Tabel 2. 9 Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2026-2029

Desa	Jml Penduduk 2025 (Jiwa)	Proyeksi 2026	Proyeksi 2027	Proyeksi 2028	Proyeksi 2029
Cikitu	7,789	7,852	7,916	7,980	8,045
Girimulya	7,037	7,094	7,151	7,209	7,267
Sukarame	6,471	6,523	6,576	6,629	6,683
Cikawao	11,655	11,749	11,844	11,940	12,037
Nagrak	13,528	13,638	13,748	13,860	13,972
Mandalahaji	14,191	14,306	14,422	14,539	14,657
Maruyung	16,384	16,517	16,651	16,786	16,922
Pangauban	13,429	13,538	13,648	13,759	13,870
Cinanggela	5,036	5,077	5,118	5,159	5,201
Mekarjaya	8,671	8,741	8,812	8,883	8,955
Mekarsari	8,895	8,967	9,040	9,113	9,187
Cipeujeuh	7,021	7,078	7,135	7,193	7,251
Cipeujeuh	7,021	7,078	7,135	7,193	7,251
Tanjungwangi	6,712	6,766	6,821	6,876	6,932
Tanjungwangi	6,712	6,766	6,821	6,876	6,932
Total Kecamatan	126,819	127,846	128,882	129,926	130,979

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Pacet, 2025

Selain memiliki tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Pacet melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah melalui pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Pelimpahan Sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan dan mengoptimalkan pelayanan publik di kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan Masyarakat. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung nomor 76 tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. Rincian Sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat dituangkan dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut bersifat delegasi yang terdiri atas kewenangan seragam untuk seluruh Camat dan kewenagan tidak seragam untuk Camat tertentu. Kewenangan seragam untuk seluruh Camat terdiri dari 16 (enam belas) urusan dan 28 (dua puluh delapan) kewenangan yang dilimpahkan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 10 Rincian Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan

No.	Urusan Pemerintahan	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	PENDIDIKAN	1. Fasilitasi keikutsertaan warga masyarakat dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan.
		2. Monitoring dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana pendidikan dasar di wilayah kecamatan.
2	KESEHATAN	3. Fasilitasi penanggulangan masalah kesehatan masyarakat tingkat kecamatan.
		4. Monitoring dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana Puskesmas, Poskesdes, dan Puskesmas Pembantu di wilayah kecamatan.
3	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, & PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5. Fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
4	SOSIAL	6. Penanganan pertama penyediaan kebutuhan dasar mendesak bagi Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
5	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	7. Penyelenggaraan pembinaan organisasi Perempuan Tingkat kecamatan.
		8. Monitoring dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap Perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
6	PERTANAHAN	9. Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
7	LINGKUNGAN HIDUP	10. Pengelolaan sampah skala kecamatan.
		11. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) skala kecamatan.
		12. Fasilitasi pembinaan desa/kelurahan berbudaya lingkungan.
		13. Fasilitasi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
8	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	14. Monitoring dan fasilitasi penyelenggaraan layanan, kelayakan sarana prasarana, serta evaluasi kinerja petugas operator dalam pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
9	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	15. Pelantikan Kepala Desa hasil pemilihan, Pergantian Antar Waktu, dan Penjabat Kepala Desa.
10	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	16. Monitoring dan fasilitasi kelayakan akses jaringan internet di lingkungan kantor Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan fasilitas umum di wilayah kecamatan.
11	KOPERASI, USAHA KECIL, & MENENGAH	17. Fasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM skala kecamatan.
		18. Promosi produk unggulan UMKM skala kecamatan.
12	PENANAMAN MODAL	19. Fasilitas dan pendampingan pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB).
		20. Monitoring kegiatan pemanfaatan tanah sesuai perizinan yang diterbitkan di wilayah kecamatan.
13		21. Pembinaan keolahragaan tingkat kecamatan.

No.	Urusan Pemerintahan	Kewenangan yang Dilimpahkan
	KEPEMUDAAN & OLAHRAGA	22. Pembinaan kepemudaan tingkat kecamatan.
14	KEBUDAYAAN	23. Pemajuan seni dan budaya tingkat kecamatan.
		24. Penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya tingkat kecamatan.
15	PARIWISATA	25. Pengembangan potensi dan budaya lokal tingkat kecamatan sebagai destinasi wisata.
		26. Fasilitasi pengembangan desa wisata dan kampung wisata.
		27. Pengembangan ekonomi kreatif bidang pariwisata skala kecamatan.
16	PERTANIAN	28. Monitoring dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana pertanian.

Sumber: Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023

Kecamatan Pacet memiliki peran strategis untuk mentransformasikan kewenangan yang dilimpahkan menjadi dampak nyata bagi kesejahteraan warganya. Berdasarkan analisis terhadap 16 urusan pemerintahan, upaya mewujudkan hal ini memerlukan pendekatan yang terintegrasi, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil.

Pilar utama keberhasilannya terletak pada penguatan fungsi fasilitasi dan koordinasi. Kecamatan Pacet tidak hanya bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, tetapi harus menjadi katalisator yang menghubungkan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial dengan sumber daya dan kebijakan yang ada. Dalam bidang pemberdayaan ekonomi, fokus pada pengembangan UMKM dan pariwisata berbasis potensi lokal dapat menjadi penggerak utama perekonomian kecamatan.

Secara operasional, efektivitas pelaksanaan kewenangan ini sangat bergantung pada tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan memprioritaskan prinsip gotong royong dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah desa, karang taruna, PKK, hingga dunia usaha Kecamatan Pacet dapat membangun sebuah ekosistem pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, kesuksesan Kecamatan Pacet dalam menjalankan kewenangannya tidak hanya diukur dari daftar program yang dijalankan, tetapi dari sejauh mana kualitas hidup masyarakat meningkat, rasa aman dan tertib terbina, serta potensi setiap desa dapat tumbuh secara merata, menuju terwujudnya Kecamatan Pacet yang mandiri, sejahtera, dan berdaysa saing.

2.1.3.2 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2021-2024

Berdasarkan tujuan dan sasaran perangkat daerah periode 2021-2026 yang telah ditetapkan, Kecamatan Pacet telah melaksanakan urusan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Keberhasilan urusan tersebut diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap sasaran yang ditetapkan.

Tabel 2. 11 Target, Realisasi dan Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pacet Tahun 2021 – 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian Indikator sasaran												
					TARGET					REALISASI				CAPAIAN			
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan akuntabiltas Pemerintahan Kecamatan Pacet	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik	Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Poin	66,00	68,47	70,52	72.64	74,82	66,48	75,7	75,8	72.64	100,73%	110,56%	107,49%	107,49%
			Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	80,00	80,10	81,70	83,30	85,33	89,21	88,99	89,49	83,30	111,51%	111,10%	109,53%	109,53%
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Nilai IKM	Poin	80,00	80,41	82,01	83.66	85	81,93	80,64	80,37	83.66	102,41	100,29%	98,00%	98,00%
3	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kewilayahan dan Kemasyarakatan	Persentase desa yang beradministrasi baik	Persen	N/A	62,00	64,00	N/A	N/A	N/A	61,54	69,23	N/A	NA	99,26%	108,17%	0,00%
			Jumlah Desa Cepat Berkembang	Desa	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	1	NA	N/A	N/A	100,00%

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Pacet, 2025

Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, kemudian adanya Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pacet Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, terdapat perubahan pada indikator sasaran Meningkatnya kualitas pemerintahan desa dimana sebelumnya Persentase desa beradministrasi baik menjadi Jumlah Desa Cepat Berkembang.

Secara umum, indikator yang ditetapkan selama periode tersebut telah menunjukkan capaian tinggi, bahkan konsisten mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pacet Tahun 2021-2026. Terutama pada indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pacet yaitu nilai IKM yang setiap tahunnya konsisten mengalami peningkatan. Adapun IKU Jumlah Desa Cepat Berkembang belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan baru dilaksanakan pada tahun 2024.

2.1.3.3 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian dan Kinerja Yang Menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Pacet Pada Renstra Tahun 2021-2026 Mencakup Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan

Dalam rangka memastikan keselarasan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Kecamatan Pacet melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja Renstra Tahun 2021–2026. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan yang dilaksanakan telah berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja kegiatan (IKK), serta output dan outcome pembangunan yang menjadi tanggung jawab kecamatan.

Dengan penyajian hasil evaluasi yang terstruktur, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Pacet Tahun 2021–2026. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, tetapi juga menjadi landasan penting dalam penyusunan Renstra Kecamatan Pacet

Tahun 2025–2029, sehingga lebih adaptif terhadap tantangan, sesuai kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung.

Tabel 2. 12 Target, Realisasi dan Capaian Anggaran

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi dan capaian anggarn Kecamatan					
		2022		2023		2024	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	75.70 Poin		75.80 Poin		80.10 Poin	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	75.70 Poin	4,516,209,309.00	75.80 Poin	4,679,743,589.00	80.10 Poin	2,172,648,916.00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	46,680,700.00	100 %	56,677,580.00	%	1,190,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,000,000.00	1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	510,000.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	32,692,500.00	1 Dokumen	20,157,580.00	1 Dokumen	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	320,000.00	1 Dokumen	10,690,000.00	1 Dokumen	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1,999,000.00	2 Dokumen	8,480,000.00	1 Dokumen	680,000.00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,675,000.00	1 Dokumen	8,480,000.00	1 Dokumen	-

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi dan capaian anggarn Kecamatan					
		2022		2023		2024	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1,314,800.00	2 Laporan	5,870,000.00	1 Laporan	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	6,679,400.00	2 Laporan	2,000,000.00	1 Laporan	-
penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-
pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	-	0 Data	-	0 Data	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100 %	3,809,636,357.00	100 %	4,062,750,469.00	%	1,973,206,280.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	266 Orang/Bulan	3,801,638,757.00	252 Orang/Bulan	4,057,750,469.00	136 Orang/Bulan	1,973,206,280.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	1,999,800.00	2 Laporan	2,000,000.00	1 Laporan	-
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	1,999,800.00	2 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4 Laporan	2,000,000.00	4 Laporan	1,000,000.00	3 Laporan	-

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi dan capaian anggarn Kecamatan					
		2022		2023		2024	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	1,998,000.00	2 Dokumen	1,000,000.00	0 Dokumen	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	100 %	-	100 %	10,000,000.00	%	510,000.00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	-	1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	-
Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	-	2 Laporan	1,000,000.00	1 Laporan	-
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	-	1 Laporan	8,000,000.00	1 Laporan	510,000.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	100 %	-	100 %	19,066,660.00	%	2,824,000.00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	-	20 Orang	19,066,660.00	20 Orang	2,824,000.00
Bimbingan Terknis Inplementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100 %	108,884,396.00	100 %	130,773,900.00	%	62,595,324.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3,982,700.00	2 Paket	4,416,000.00	1 Paket	969,100.00

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi dan capaian anggarn Kecamatan					
		2022		2023		2024	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	41,398,500.00	2 Paket	62,507,900.00	1 Paket	42,200,700.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4,995,000.00	1 Paket	5,000,000.00	1 Paket	1,660,200.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	-	0 Paket	-	Paket	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1,830,696.00	1 Paket	1,850,000.00	1 Paket	560,324.00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	12,000,000.00	4 Laporan	12,000,000.00	1 Laporan	1,860,000.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	44,677,500.00	1 Lapoan	45,000,000.00	1 Laporan	15,345,000.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.1 %	9,400,000.00	81.70 %	11,812,600.00	%	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	9,400,000.00	1 Paket	11,812,600.00	0 Paket	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit		0 Unit		0 Unit	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	282,109,995.00	100 %	286,663,980.00	%	125,498,312.00

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi dan capaian anggarn Kecamatan					
		2022		2023		2024	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,440,000.00	1 Laporan	3,492,000.00	1 Laporan	1,250,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	11,369,943.00	12 Laporan	34,355,980.00	6 Laporan	3,473,312.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	268,300,052.00	12 Laporan	248,816,000.00	8 Laporan	120,775,000.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	88.10 %	259,497,861.00	89.49 %	101,998,400.00	89.49 %	6,825,000.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 unit	21,454,063.00	2 Unit	24,000,000.00	0 Unit	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	7,925,000.00	3 Unit	12,000,000.00	2 Unit	6,100,000.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	8,750,400.00	5 Unit	5,000,000.00	3 Unit	725,000.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	221,368,398.00	1 Unit	60,998,400.00	0 Unit	-
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80.64 Poin	0.00	80.37 Poin	-	80.37 Poin	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80.64 Poin	140,432,800.00	80.37 Poin	82,067,020.00	80.37 Poin	103,264,400.00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 %	-	100 %	8,230,000.00	%	-
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	0 Laporan	-	1 Laporan	4,250,000.00	1 Laporan	-

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi dan capaian anggarn Kecamatan					
		2022		2023		2024	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen		1 Dokumen	3,980,000.00	0 Dokumen	-
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	0 %	-	100 %	7,960,000.00	%	-
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	-	1 Laporan	3,980,000.00	0 Laporan	-
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	-	1 Laporan	3,980,000.00	0 Laporan	-
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100 %	9,841,800.00	100 %	24,888,020.00	%	-
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	9,841,800.00	1 Dokumen	24,888,020.00	0 Dokumen	-
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	100 %	130,591,000.00	100 %	40,989,000.00	%	103,264,400.00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	130,591,000.00	2 Laporan	40,989,000.00	2 Laporan	103,264,400.00

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi dan capaian anggarn Kecamatan					
		2022		2023		2024	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100 %	19,934,800.00	100 %	38,965,400.00	%	23,160,000.00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 %	-	100 %	14,000,000.00	%	23,160,000.00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan		1 Laporan	4,250,000.00	1 Laporan	8,160,000.00
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0 Laporan		1 Laporan	9,750,000.00	1 Laporan	15,000,000.00
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	19,934,800.00	100 %	24,965,400.00	%	-
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	19,934,800.00	2 Laporan	24,965,400.00	0 Laporan	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100 %	37,477,000.00	100 %	72,288,660.00	%	21,360,000.00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	37,477,000.00	100 %	72,288,660.00	%	21,360,000.00

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi dan capaian anggarn Kecamatan					
		2022		2023		2024	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Kegiatan	9,940,000.00	0 Orang	-	0 Orang	-
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 Orang		110 Orang	19,902,000.00	0 Orang	-
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2 Kegiatan	27,537,000.00	230 Orang	10,136,660.00	171 Orang	15,360,000.00
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0 Laporan	-	1 Laporan	4,250,000.00	0 Laporan	-
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Dokumen	-	1 Dokumen	38,000,000.00	1 Dokumen	6,000,000.00

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi dan capaian anggarn Kecamatan					
		2022		2023		2024	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Persentase Desa yang beradministrasi baik	61.54 %		69.23 %		69.23	%
	Jumlah Desa Cepat Berkembang	0 Desa	-	0	0	Desa	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	-	100 %	122,807,660.00		47,365,000.00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100 %	-	100 %	55,210,000.00	29,26 5,0	29,265,000.00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	3,980,000.00	0	Lembaga Kemasyarakatan
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0 Dokumen		1 Dokumen	3,980,000.00	0	Dokumen
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan		1 Laporan	47,250,000.00	1 Laporan	29,265,000.00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	100 %	-	100 %	67,597,660.00	%	18,100,000.00
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	-	1 Lembaga Kemasyarakatan	43,011,000.00	1 Lembaga Kemasyarakatan	18,100,000.00
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Lembaga Kemasyarakatan	-	1 Laporan	20,336,660.00	0 Laporan	-

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi dan capaian anggarn Kecamatan					
		2022		2023		2024	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	0 Laporan	-	1 Laporan	4,250,000.00	0 Laporan	-
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	0 %	-	0 %	-	%	-
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0 %	-	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga	-
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan perilaku bersih dan sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga	-
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	0 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga	-
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga	-

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi dan capaian anggarn Kecamatan					
		2022		2023		2024	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0 Keluarga		0 Keluarga		0 Keluarga	-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100 %	70,000,000.00	100 %	87,539,160.00	%	52,784,600.00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase desa yang dibina	100 %	70,000,000.00	100 %	87,539,160.00	%	52,784,600.00
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	19,981,860.00	1 Dokumen	5,292,600.00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	10,000,000.00	12 Dokumen	22,413,340.00	6 Dokumen	18,379,000.00
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	-	1 Dokumen	2,250,000.00	Dokumen	-
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	20,000,000.00	1 Dokumen	30,143,960.00	1 Dokumen	29,113,000.00
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	30,000,000.00	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	0 Dokumen	-	1 Dokumen	4,250,000.00	0 Dokumen	-
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan	0 Dokumen	-	1 Dokumen	4,250,000.00	0 Dokumen	-

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi dan capaian anggarn Kecamatan					
		2022		2023		2024	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa						
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	-	1 Laporan	4,250,000.00	0 Laporan	-
Jumlah Total			4,784,053,909.00		5,083,411,489.00		2,420,582,916.00

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Pacet,2025

Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja dan keuangan Kecamatan Pacet dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2021–2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan telah berjalan cukup baik dengan capaian keuangan yang pada umumnya tinggi. Berdasarkan evaluasi perlunya adanya perbaikan dalam sinkronisasi antara perencanaan program, pengalokasian anggaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan, guna meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran agar serapan keuangan dapat lebih berbanding lurus dengan capaian kinerja nyata di lapangan. Faktor pendorong utama keberhasilan ini antara lain adanya komitmen aparatur, dukungan kebijakan pemerintah daerah, serta respon masyarakat yang relatif baik terhadap pelayanan publik. Namun, masih terdapat beberapa hambatan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan dan implementasi, serta kendala dalam pengendalian dan monitoring program. Oleh karena itu, meskipun kinerja Kecamatan Pacet telah berjalan cukup baik, upaya peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kesinambungan pelayanan publik masih perlu terus dilakukan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Pacet

Kelompok sasaran pelayanan perangkat daerah adalah pihak- pihak yang menjadi fokus utama penerima layanan dari suatu perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut. Penentuan kelompok sasaran pelayanan perangkat daerah penting untuk dirumuskan agar pelayanan perangkat daerah dapat tepat sasaran dan efektif dan memudahkan perangkat daerah dalam merumuskan strategi, arah kebijakan, program dan anggaran serta evaluasi terhadap pelaksanaannya. Kecamatan Pacet harus menentukan kelompok sasaran yang mencerminkan bahwa Kecamatan Pacet sebagai perangkat daerah kewilayahan yang diamanatkan untuk melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan Pacet, melaksanakan pelayanan publik dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kelompok sasaran pada pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yaitu seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bandung dan pemerintah desa di Kecamatan Pacet. Koordinasi yang efektif antara perangkat daerah di Kabupaten Bandung dengan seluruh pemerintah desa sangat penting untuk memastikan kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Bandung dapat selaras sehingga Kecamatan Pacet sebagai perangkat daerah kewilayahan berperan sebagai penghubung dan fasilitator dalam menjembatani komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Kelompok sasaran pada pelaksanaan pelayanan publik adalah seluruh masyarakat Kecamatan Pacet yang tersebar di 13 Desa. Pelayanan publik merupakan hak setiap masyarakat yang harus terpenuhi secara menyeluruh kepada setiap masyarakat. Kecamatan Pacet sebagai perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan publik di wilayah wajib memastikan setiap warga untuk mendapatkan pelayanan dan memastikan tidak ada pihak yang terabaikan.

Kelompok sasaran pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa yaitu seluruh masyarakat Kecamatan Pacet dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Pacet. Pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan merupakan kunci dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan partisipatif. Masyarakat yang diberdayakan akan lebih mandiri dan mampu berkontribusi aktif dalam pembangunan Kabupaten Bandung. Kecamatan Pacet sebagai perangkat daerah yang diamanatkan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa di tingkat Kecamatan wajib memastikan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat meningkat secara menyeluruh.

2.1.5 Mitra Kecamatan Pacet dalam Pemberian Pelayanan

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pacet tidak dapat bekerja secara sendiri, melainkan membutuhkan dukungan serta sinergi dengan berbagai pihak sebagai mitra kerja. Kecamatan Pacet berperan sebagai koordinator, fasilitator, dan penghubung antara masyarakat dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung yang memiliki kewenangan teknis. Kehadiran

mitra ini menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan pelayanan, memperkuat efektivitas program, serta memastikan bahwa layanan yang diberikan benarbenar menjawab kebutuhan masyarakat. Mitra Kecamatan Pacet dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Pemerintah Desa

   Sebagai perpanjangan tangan kecamatan di tingkat desa, pemerintah desa menjadi mitra utama dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, pelayanan dasar, serta koordinasi pembangunan wilayah.

b. Perangkat Daerah Terkait

   Kecamatan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung dalam hal pelayanan yang bersifat sektoral, seperti:

   - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terkait pelayanan administrasi kependudukan, seperti pembuatan KTP, KK,akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya yang menjadi kebutuhan dasar Masyarakat.
   - Dinas Sosial, dalam penyaluran bantuan sosial, penanganan fakir miskin, penyandang disabilitas, anak terlantar, maupun program kesejahteraan sosial lainnya.
   - Dinas Kesehatan, mendukung pelayanan kesehatan masyarakat melalui puskesmas dan posyandu.
   - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mitra utama dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk penguatan kapasitas aparatur desa dan pengelolaan dana desa.
   - Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dalam penanganan bencana alam maupun non-alam, kesiapsiagaan, serta mitigasi risiko bencana di wilayah kecamatan.
   - Satuan Polisi Pamong Praja, dalam penegakan perda, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
   - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, sebagai mitra dalam perencanaan pembangunan, sinkronisasi program, dan penyelarasan arah kebijakan dengan RPJMD Kabupaten Bandung.

- Dinas Lingkungan Hidup, terkait pengelolaan lingkungan, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, serta pelestarian lingkungan hidup.
- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terkait program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (Bangga Kencana).

c. Instansi Vertikal

Instansi vertikal adalah perangkat pemerintahan pusat yang ada di daerah, yang struktur organisasinya langsung berada di bawah kementerian/lembaga, bukan di bawah pemerintah daerah. Meski begitu, dalam praktik pelayanan publik, instansi vertikal sering menjadi mitra penting kecamatan seperti:

- Kepolisian Sektor (Polsek), mitra dalam menjaga keamanandan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
- Komando Rayon Militer, mitra dalam bidang pertahanan dan ketahanan wilayah.
- Kantor Urusan Agama, mitra dalam pelayanan urusan keagamaan, khususnya pencatatan pernikahan, pembinaan kehidupan beragama, zakat, dan wakaf.
- Kantor Pertanahan/BPN, mitra dalam urusan pertanahan, seperti pendaftaran tanah sistematis.

Dengan adanya kolaborasi bersama mitra-mitra tersebut, pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Pacet dapat berlangsung lebih terpadu, efektif dan efisien sehingga mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Pacet

2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025-2029

RPJMN 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang memuat arah, prioritas, dan target pembangunan Indonesia dalam jangka menengah, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi dan pemberdayaan masyarakat. Analisis terhadap RPJMN ini penting untuk memastikan bahwa permasalahan

pelayanan yang diidentifikasi di tingkat kecamatan selaras dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

Dengan demikian, Renstra Kecamatan Pacet dapat dirancang secara efektif untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sekaligus menjawab kebutuhan dan tantangan lokal secara tepat.

Dalam mewujudkan transformasi digital, iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi, hukum berkeadilan, keamanan nasional, stabilitas ekonomi mikro serta regulasi dan tata kelola berintegritas dan adaptif, pemerintah menetapkan salah satu prioritas nasional yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberatansan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan. Reformasi dalam bidang politik, hukum, dan birokrasi merupakan aspek krusial untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab. Reformasi ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat, seperti korupsi, pemakaian narkoba, judi, dan penyelundupan.

2.2.2 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang memuat perumusan kebijakan pembangunan jangka menengah pada periode tahun 2025-2029 yang terintegrasi dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Selain itu, RPJMD dirancang untuk menyusun kebijakan yang holistrik, Tematik, integrative dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut dari evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD sebelumnya. Sebagai dokumen perencanaan, RPJMD disusun dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi yang dimiliki, serta kearifan lokal guna memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. RPJMD berperan sebagai acuan dalam pengendalian, evaluasi, serta akuntabilitas pembangunan daerah. RPJMD juga menjadi instrumen untuk menerjemahkan sasaran strategis jangka panjang dari RPJPD kedalam program dan kegiatan yang terukur dalam jangka menengah.

Sebagai bagian Integral dari Pemerintah Kabupaten Bandung, Kecamatan Pacet yang merupakan salah satu Perangkat Daerah di

wilayah, selalu mengacu kepada Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bandung yang berangkat dari potensi dan kondisi yang ada.

Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Bandung adalah : "Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera (BEDAS) , Maju, Dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas".

penjabaran dari Visi Kabupaten Bandung tersebut 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Lebih Bedas: Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas memiliki arti yaitu untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang diwarsikan leluhur dan senantiasa dilestarikan sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat warga Kabupaten Bandung dalam membangun peradaban yang terus lebih baik dari masa ke masa.
2. Maju: Terwujudnya Kabupaten Bandung Maju, memiliki arti yaitu Kabupaten Bandung dalam 5 (lima) tahun kepemimpinan akan mencapai kondisi terbaik perkembangan Masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginyaangka indikator-indikator ytertentu yang berlaku, tercapainya standar minimal yang ditetapkan secara nasional, serta peningkatan Indeks PembangunanManusia (IPM) melampaui rata-rata Provinsi dan nasional.
3. Berkelanjutan: Terwujudnya Kabupaten Bandung Berkelanjutan, Memiliki arti yaitu Pembangunan yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung akan diupayakan dengan mempertimbangkan segala aspek secara bijaksana. Pembangunan yang diselenggarakan tidak akan pernah mengorbankan alam sehingga manfaatnya dapat terus dinikamti oleh Masyarakat Kabupaten Bandung.

Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan misia Pembangunan

jangka menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 yang akanmenjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan berpedoman pada misi nomor 3 yaitu: mengoptimalkan tata kelola

pemerintah dan pelayanan publik yang partisipatif, transfaran dan akuntabel;

Untuk Lebih Jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut ini:

Gambar 2. 3 Cascading Misi Pembangunan 3



Sumber: RPJMD 2025-2029 Hasil Analisis Bapperida, 2025.

Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung 2025-2029 menjadi bagian penting dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pangalengan, RPJMD Kabupaten Bandung menekankan pada percepatan Pembangunan yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas dengan fokus pada Pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan Berkelanjutan serta Ketahanan terhadap bencana, Pemerataan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta peningkatan daya saing sumber daya manusia, Penguatan Ekonomi Inklusif dan pengurangan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan daerah, Peningkatan Infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan serta Penguatan Ketahanan sosial serta peningkatan keamanan dan ketertiban.

2.2.3 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2043.

Kecamatan Pacet di Kabupaten Bandung memiliki karakteristik yang unik dan strategis sebagai kawasan konservasi, destinasi pariwisata utama, dan penghasil produk pertanian-hortikultura. Penelaahan RTRW-nya harus fokus pada penyeimbangan antara tekanan pembangunan ekonomi dari sektor pariwisata dengan perlindungan fungsi lingkungan hidup yang menjadi penopang utama wilayahnya. RTRW untuk Pacet idealnya adalah sebuah rencana pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang menjadikan konservasi sebagai arus utama, memitigasi risiko bencana, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditunjukan untuk mengidentifikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan Kecamatan Pacet sehingga dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan proritas wilayah pelayanan Kecamatan Pacet dalam jangka panjang.

Dalam rangka mendukung pengembangan wilayah yang terarah, Berdasarkan RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2043, Kabupaten Bandung menetapkan sejumlah kawasan strategis berdasarkan skala pelayanannya. Rencana struktur ruang yang berkaitan dengan Wilayah Kecamatan Pacet adalah sebagai berikut :

1. Pusat Pelayanan Lingkungan
    - Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pertanian.
    - Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata.
    - Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan sosial dan budaya skala desa hingga kecamatan.
    - Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelayanan infrastruktur permukiman.
    - Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kegiatan pendidikan dasar
2. Pengembangan Jaringan Jalan Kabupaten
    - Jalan Cikoneng (Bts. Kec. Ciparay/Pacet) – Lemburawi.
    - Jalan Ciparay - Cikoneng (Bts. Kec. Ciparay/Pacet).

- Jalan Jembatan Cihejo (Bts. Kec. Pacet/Kertasari) - Sp. Pacet.
- Jalan Lembur Awi - Jembatan Cihejo (Bts. Kec. Pacet/Kertasari).
- Jalan Sp. Pacet – Santosa.
- Jalan Padasuka - Neglasari (Bts. Kec. Majalaya/Pacet)
- Jalan Lembur Awi - Bts. Kec. Pacet/Kertasari (ke Sukapura)
- Jalan Liomadur - Mekarsari (Bts. Kec. Pacet)
- Jalan Neglasari (Bts. Kec. Majalaya/Pacet) – Maruyung.
- Pengembangan Angkutan Umum Masal

3. Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung
   - Peningkatan kualitas dan kapasitas Desa Mandiri Energi
4. Sistem Pengendalian Banjir
   - Waduk Cikitu di Kecamatan Pacet
5. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
   - SPAM Cibulakan di Kecamatan Pacet
   - Mata Air Cihaneut di Kecamatan Pacet
6. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
   - Kantor Camat Pacet di Kecamatan Pacet
7. Sistem Drainase
   - Pembangunan/Penataan Sistem Drainase Berbasis Eco - Drainage pada Jaringan Drainase Sekunder
   - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase pada Jaringan Drainase Primer
   - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase pada Jaringan Drainase Sekunder
   - Pengaturan Sistem Drainase Sesuai Hierarki dan Terpadu yang terintegrasi dengan Badan Air Penerima Berbasis Eco - drainage pada Jaringan Drainase Primer
   - Pengaturan Sistem Drainase Sesuai Hierarki dan Terpadu yang terintegrasi dengan Badan Air Penerima Berbasis Eco - drainage pada Jaringan Drainase Primer

Kecamatan Pacet di Kabupaten Bandung dikenal sebagai kawasan agropolitan dengan lanskap perbukitan, hawa sejuk, dan sumber mata air yang melimpah. Rencana pola tata ruangnya dirancang untuk memperkuat identitas ini dengan memanfaatkan

kondisi alamnya secara berkelanjutan. Berikut adalah penjabaran tiga kawasan utamanya:

1. Kawasan Perkebunan

   Kawasan Perkebunan di Pacet difokuskan pada lereng-lereng bukit yang subur, yang merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Hulu. Fungsi kawasan ini sangat krusial, tidak hanya secara ekonomi tetapi juga ekologis.

   - Komoditas Unggulan : Hortikultur dataran tinggi seperti kentang , wortel, kol, brokoli, dan bawang daun.
   - Pendekatan : Diterapkan Sistem Pertanian Terintegrasi dan Organik untuk mengurangi runoff pupuk kimia ke sungai.

2. Kawasan Peternakan

   Kawasan Peternakan di Kecamatan Pacet dikembangkan sebagai pusat peternakan terpadu yang memanfaatkan kondisi alam dan lokasi strategis. Pengembangan kawasan ini dirancang dengan pendekatan bio-sirkular, mengintegrasikan peternakan dengan kawasan perkebunan dan perikanan yang sudah ada.

3. Kawasan Perikanan

   Kecamatan Pacet dialiri oleh banyak anak sungai yang jernih dan memiliki sumber mata air, sehingga sangat potensial untuk budidaya ikan air tawar berkualitas, diantaranya adalah sebagai berikut :

   - Kolam air deras memanfaatkan aliran sungai yang deras untuk budidaya ikan yang membutuhkan oksigen tinggi, seperti ikan nila dan ikan mas.
   - Keramba jaring apung terbatas dan terkontrol diterapkan di badan sungai atau bendungan kecil dengan regulasi ketat untuk mencegah pencemaran. Ikan lele dan ikan nila adalah komoditas utama.

2.2.4 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan integrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS berperan

dalam menilai dampak kebijakan sejak tahap perencanaan agar tidak merusak ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Bapperida Kabupaten Bandung telah melakukan kajian mengenai isu-isu yang akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembangunan berkelanjutan yang lebih terarah dan efektif. Muatan KLHS RPJMD tahun 2025-2029 terfokus pada 9 isu PB strategi dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2. 13 Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Bandung

No	Isu PB Prioritas Berdasarkan 203 Indikator	TPB yang mendukung Isu PB
1	Rendahnya kualitas SDM (sumber daya manusia) mengakibatkan rendahnya kualitas hidup Masyarakat	TPB 4
2	Belum optimalnya tata kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan program antar OPD	TPB 16
3	Belum optimalnya penanganan tanggap darurat bencana	TPB 1

Sumber: KLHS RPJMD, 2025

Sebagai wilayah administratif yang terus mengalami perkembangan, Kecamatan Pacet memiliki peran strategis dalam mendukung penyelesaian isu-isu pembangunan secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Kecamatan Pacet berkomitmen untuk mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) melalui pendekatan kolaboratif bersama Pemerintah Kabupaten, pemerintah desa, serta partisipasi aktif masyarakat.

Upaya ini diwujudkan melalui perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan yang selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu. Dengan demikian, pembangunan di wilayah Kecamatan Pacet diharapkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sumber daya, keadilan sosial, serta ketahanan wilayah dalam jangka panjang.

2.2.5 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pacet

Kecamatan Pacet, yang terletak di wilayah Kabupaten Bandung, menghadapi serangkaian tantangan multidimensi yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakatnya. Permasalahan-permasalahan ini saling berkaitan dan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bidang utama.

1. Tantangan Internal Birokrasi dan Pelayanan

   Pada aspek tata kelola pemerintahan, Kecamatan Pacet menghadapi kendala mendasar pada Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur. Jumlah pegawai yang terbatas dan tidak sebanding dengan volume kerja menyebabkan beban tugas menumpuk pada individu tertentu. Selain itu, kompetensi teknis dan manajerial yang belum merata di antara aparatur memperlambat proses kerja dan inovasi. Hal ini diperparah oleh belum optimalnya Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP). Lemahnya pemahaman konsep akuntabilitas, tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku, serta minimnya pendampingan dari instansi pembina menyebabkan pengukuran dan pelaporan kinerja menjadi tidak efektif.

2. Tantangan dalam Pembinaan Desa

   Permasalahan tidak hanya berhenti di tingkat kecamatan. Kapasitas pengelolaan keuangan dan administrasi di tingkat desa juga menjadi perhatian serius. Kompetensi perangkat desa yang masih terbatas dalam hal administrasi dan pengelolaan anggaran berpotensi menimbulkan ketidaktertiban dan inefisiensi, yang pada akhirnya dapat menghambat penyerapan dan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan.

3. Tantangan Lingkungan dan Bencana

   Secara geografis, Pacet yang memiliki kontur wilayah berbukit menghadapi kerentanan terhadap bencana alam, khususnya tanah longsor dan banjir. Di sisi lain, permasalahan sampah liar menjadi bukti dari dua akar masalah yang berbeda: keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah (seperti Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu/TPST) dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya serta menjaga kebersihan lingkungan.

4. Tantangan Kesejahteraan dan Infrastruktur Dasar

   Sebagai kawasan yang sebagian masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian, terdapat potensi permasalahan pada kesejahteraan masyarakat, seperti fluktuasi pendapatan yang bergantung pada musim, minimnya penerapan teknologi pertanian, dan keterbatasan aksas pemasaran. Pengembangan sektor pariwisata dan UMKM juga belum optimal untuk

mendiversifikasi ekonomi lokal. Selain itu, infrastruktur dasar seperti akses jalan ke daerah pelosok dan kestabilan jaringan internet masih menjadi kendala yang menghambat pemerataan pembangunan dan akses informasi.

Tabel 2. 14 Pemetaan Permasalahan Kecamatan Pacet

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pelayanan Publik	Kualitas pelayanan kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan.	1. Sarana-Prasarana: Keterbatasan fasilitas pendukung pelayanan (komputer, internet, ruangan).
			2. Inovasi: Kurangnya terobosan model pelayanan.
			3. Standar Prosedur: Penerapan SOP yang belum optimal dan konsisten.
2	Pengelolaan Dana Desa	Pengelolaan keuangan dan administrasi desa belum sepenuhnya tertib.	1. Kapasitas Aparatur Desa: Kompetensi perangkat desa dalam pengelolaan keuangan dan administrasi masih terbatas.
3	Lingkungan Hidup & Bencana Alam	Kerawanan bencana alam (longsor, banjir) dan permasalahan sampah liar.	1. Infrastruktur: Keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah (TPST, bank sampah).
			2. Kesadaran Masyarakat: Perilaku membuang sampah sembarangan masih tinggi.
			3. Faktor Alam: Kontur topografi daerah berbukit yang rawan longsor.
4	Kesejahteraan Masyarakat	(Kontekstual) Potensi rendahnya pendapatan di sektor pertanian dan ketergantungan pada musim.	1. Teknologi Pertanian: Penerapan teknologi modern masih minim.
			2. Pemasaran: Aksas pasar yang terbatas bagi produk lokal.
			3. Diversifikasi Ekonomi: Belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata dan UMKM.
5	Infrastruktur Dasar	(Kontekstual) Aksesibilitas dan kualitas infrastruktur yang belum merata.	1. Akses Jalan: Jalan menuju beberapa kampung/desa masih sulit.
			2. Jaringan Internet: Sinyal internet yang tidak stabil di daerah pelosok.

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Pacet,2025

2.2.6 Isu Strategis

Penyusunan isu strategis dalam Rencana Strategis 2025-2029 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi Pembangunan. Proses ini mencakup analisis terhadap faktor internal dan eksternal yang berpotensi mempengaruhi arah kebijakan dan program Pembangunan. Faktor internal meliputi potensi dan permasalahan pada bidang social, ekonomi, infrastruktur, serta tata Kelola pemerintahan, sedangkkan faktor eksternal mencakup kebijakan nasional, dinamika global, serta perkembangan sosial dan ekonomi di Tingkat regional. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, isu strategis yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam penyusunan program Pembangunan.

Kecamatan Pacet sebagai instansi sektor publik telah mengupayakan penyusunan Perubahan Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2025-2029 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Perubahan Rencana strategis Kecamatan Pacet dalam penyusunannya melibatkan seluruh

komponen di kecamatan yang telah menempatkan Perubahan Renstra sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan kinerja aparatur Kecamatan Pacet yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, murah dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Berdasarkan data empirik dan kondisi aktual yang berkembang di wilayah kerja, teridentifikasi beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

1. Kualitas Pelayanan Publik.
2. Prevalensi Stunting pada balita.
3. Pengelolaan Sampah Berkelanjutan yang Efektif Secara Berkelanjutan.
4. Persoalan Penduduk Miskin Ekstrem yang Memerlukan Penanganan Khusus.
5. Tingkat Kerentanan dan Potensi Bencana Alam.
6. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Desa, yang berimplikasi pada kinerja Pemerintahan Desa yang belum optimal.
7. Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan.

Upaya – upaya dalam meminimalisasi permasalahan yang telah dilakukan Kecamatan Pacet antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penataan ruang pelayanan, perbaikan sistem pelayanan dan peningkatan kualitas SDM petugas layanan;
2. Pelaksanaan Pencegahan penanganan stunting bersama stakeholder terkait melalui sosialisasi pencegahan stunting secara berkala dan berkelanjutan, pendataan stunting yang akurat dan berkelanjutan, adanya big data stunting.
3. Mendorong Sinergitas dengan stakeholder terkait penanggulangan pengelolaan persampahan melalui Bank sampah Desa, Program kampung Bedas, Program Proklim, dan komunitas pengelolaan sampah oleh masyarakat, serta penarikan sampah oleh DLH.
4. Sinergitas dengan stakeholder terkait dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim.

5. Sinergitas dengan stakeholder terkait dalam pencegahan dan pananganan bencana alam melalui sosialisasi, Desa Siaga bencana, dan keluarga siaga bencana.
6. Mengadakan Pelatihan, Pembinaan, Pengawasan serta Evaluasi terhadap SDM perangkat Desa dalam peningkatan kinerja Pemerintah Desa;
7. Meningkatkan kinerja aparat Kecamatan sehingga dapat melaksanakan pelimpahan sebagian urusan kewenangan Bupati Kepada camat.

Tabel 2. 15 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Pacet

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
	Kualitas pelayanan kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan.	Peningkatan Kapasitas SDM	Ketimpangan Pembangunan & Kesenjangan Digital	Pemerataan Pembangunan & Layanan Publik	Otonomi Daerah Terhambat & Daya Saing Lemah	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintahan untuk optimalisasi kualitas Pelayanan
	Pengelolaan keuangan dan administrasi desa belum sepenuhnya tertib.	Penguatan Kapasitas SDM Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Ketimpangan Pembangunan & Kesenjangan Digital	Program peningkatan tata kelola Pemerintahan desa	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa	Peningkatan Kapasitas SDM untuk optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Desa
	Kerawanan bencana alam (longsor, banjir) dan permasalahan sampah liar.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Dan Lingkungan	Perubahan Iklim	Sistem Penanggulangan Bencana yang Lemah	Kerusakan Lingkungan & Tata Ruang Lemah	Tingginya kerentanan dan potensi bencana alam
	(Kontekstual) Potensi rendahnya pendapatan di sektor pertanian dan ketergantungan pada musim.	Keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim	pertanian cerdas iklim	Penguatan Ketahanan Sistem Pertanian Berbasis Lingkungan dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kerentanan produksi pangan akibat dampak perubahan iklim
	(Kontekstual) Aksesibilitas dan kualitas infrastruktur yang belum merata.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Dan Lingkungan	Strategi pembangunan inklusif	Strategi Pemerataan Layanan Publik	Perbaikan Aksesibilitas Infrastruktur dasar	Ketimpangan akses dan keterjangkauan infrastruktur antar wilayah

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Pacet, 2025

1. Isu Strategis Satu : Peningkatan Tata Kelola Lingkungan

   Isu pertama merupakan tantangan paling mendasar yang menghubungkan langsung antara masalah lokal dengan tren global. Permasalahan sampah yang mencemari lingkungan di Pacet bukanlah fenomena yang terisolasi, melainkan cerminan dari krisis pengelolaan sampah nasional yang diperparah oleh dampak perubahan iklim global. Pada tingkat lokal, buruknya tata kelola lingkungan ini terlihat dari:

   - Polusi sampah domestik yang mengkontaminasi sumber air, tanah, dan udara
   - Ancaman terhadap sektor unggulan seperti pertanian dan pariwisata akibat penurunan kualitas lingkungan
   - Dampak kesehatan masyarakat yang semakin mengkhawatirkan

     Yang memperumit situasi ini adalah konflik lahan TPA di tingkat regional yang menghambat penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah yang tepat. Isu strategis ini menuntut solusi terpadu yang memadukan pendekatan teknis, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat.

2. Isu Strategis 2 : Peningkatan Kapasitas SDM

   Isu kedua bersumber dari keterbatasan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur yang dipengaruhi oleh dinamika kebijakan yang lebih luas. Kesenjangan digital global dan ketimpangan pembangunan nasional berimplikasi langsung terhadap kualitas pelayanan publik di Pacet. Manifestasi isu ini dalam konteks lokal meliputi:

   Akses terbatas terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi Keterbatasan sarana-prasarana pendukung pelayanan publik Kapasitas SDM aparatur yang belum memadai Pada tingkat regional, otomomi daerah yang terhambat dan daya saing yang lemah memperparah kondisi ini, membuat Pacet kesulitan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Isu ini memerlukan intervensi sistematis dalam penguatan kapasitas kelembagaan dan transformasi digital.

3. Isu Strategis 3 : Keberlanjutan Sumber Daya Alam (SDA)

   Isu ketiga merepresentasikan ancaman eksistensial yang diperkuat oleh perubahan iklim global dan lemahnya sistem

penanggulangan bencana di tingkat nasional. Perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi, sementara sistem penanggulangan bencana nasional yang lemah membuat kesiapsiagaan lokal tidak didukung *adequately*.

Dampak lokal yang teridentifikasi:

- Ancaman terhadap keselamatan jiwa dan aset produktif masyarakat
- Gangguan terhadap aktivitas ekonomi khususnya di sektor pertanian dan pariwisata
- Kerusakan infrastruktur publik yang membebani anggaran pembangunan

4. Isu Strategis 4 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa

   Pada tingkat regional, kerusakan lingkungan dan tata ruang yang lemah di wilayah sekitar turut meningkatkan kerentanan Pacet terhadap bencana. Isu ini menuntut pendekatan berbasis ekosistem dan penguatan sistem peringatan dini.

   Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa muncul sebagai isu strategis sentral yang menjadi kunci penentu keberhasilan pembangunan di Kecamatan Pacet. Isu ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan respons fundamental dan solusi integratif untuk mengatasi tiga isu strategis sebelumnya—Tata Kelola Lingkungan, Pelayanan Publik, dan Kerentanan Bencana. Dalam konteks otonomi daerah dan UU Desa, tata kelola desa yang baik menjadi pondasi bagi pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan ke depan, Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung yang merupakan salah satu Satuan Kerja pemerintah Daerah Kabupaten Bandung perlu terus menerus mengembangkan peluang dan melakukan perubahan ke arah perbaikan seiring dengan meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, transparan yang demokratis sehingga mendorong lembaga ini untuk senantiasa mempersiapkan diri agar tetap eksis dalam proses pembangunan. Perubahan tersebut perlu dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabililtas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat masyarakat pada khususnya.

Rencana Strategis Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2029 berpedoman pada Perubahan Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

3. 1.1 Tujuan

Dalam kerangka pelaksanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien, penetapan tujuan perangkat daerah menjadi instrumen penting dalam mengarahkan perumusan sasaran dan program pembangunan yang terukur. Penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ditentukan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati, yang mencerminkan arah pembangunan atau kondisi ideal yang ingin dicapai selama masa jabatan lima tahun pada periode 2025-2029. Visi ini menjadi landasan dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah yang sejalan dengan misi yang diemban. Saat ini Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung periode tahun 2025-2029 memilki visi yang ingin dicapai selama

masa jabatan lima tahun yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”. Berikut penjabaran makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut: Lebih Bedas: Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas memiliki arti yaitu untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang

diwariskan leluhur dan senantiasa dilestarikan sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat warga Kabupaten Bandung dalam membangun peradaban yang terus lebih baik dari masa ke masa.

Terwujudnya Kabupaten Bandung Maju memiliki arti yaitu Kabupaten Bandung dalam 5 (lima) tahun kepemimpinan akan mencapai kondisi terbaik perkembangan masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya angka indikator-indikator tertentu yang berlaku, tercapainya standar minimal yang ditetapkan secara nasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga melampaui rata-rata provinsi dan nasional.

Pembangunan yang diselenggarakan tidak akan pernah mengorbankan alam sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bandung. Berdasarkan visi pembangunan yang ada, dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Misi pembangunan berikut akan menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Berikut misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul,Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Keseteraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak.
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan.

3. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel.
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi.
5. Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum.

3.1.2 Sasaran

Menjawab isu strategis Perangkat Daerah dan permasalahan Perangkat Daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran Pembangunan Kecamatan Pacet Tahun 2025–2029 difokuskan pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan. Sebagai implementasi dari tujuan strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, Kecamatan Pacet menetapkan sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan” sebagai fokus pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029. Sasaran ini menjadi landasan utama dalam mendorong transformasi layanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani.

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pacet

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
MeningkatnyaKualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0.11	0.15	0.26	0.39	0.56	0.68	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,16	87,28	87,54	87,85	88,22	88,66	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN R)

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Pacet, 2025

3.2 Strategi Kecamatan Pacet dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pacet Tahun 2025-2029

Strategi adalah suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan setiap tahunnya. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analistis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh PD yang bersangkutan.

Guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Pacet, strategi yang perlu ditempuh adalah :

1. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik
2. Menigkatkan kualitas pelayanan publik dan tata Kelola pemerintahan
3. Meningkatkan kualitas pemerintahanan desa

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Kecamatan Pacet

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana serta mekanisme pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat	Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat serta membangun pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui peningkatan pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui penerapan pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat yang berkelanjutan
Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui pemetaan permasalahan dan potensi lokal	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan mendorong inovasi berdasarkan hasil pemetaan permasalahan dan potensi lokal	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Pacet 2025

Tahap I – Tahun 2026 :

Tahun 2026 merupakan tahap pertama atau fase awal yang menitikberatkan pada penguatan pondasi. Fokus diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM aparatur kecamatan, penyediaan sarana dan prasarana, serta penyusunan mekanisme pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan pemetaan kondisi, permasalahan dan potensi desa yang menjadi basis data untuk peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tahun-tahun berikutnya. Dengan adanya pondasi yang kuat pada tahap awal ini, diharapkan Kecamatan Pacet mampu membangun sistem pelayanan yang efektif sekaligus menyiapkan dasar strategi pemberdayaan masyarakat yang terarah, berkelanjutan, dan sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki.

Tahap II – Tahun 2027:

Pada tahap kedua, peningkatan kapasitas SDM aparatur kecamatan serta penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik terus dilanjutkan sebagai tindak lanjut dari penguatan pondasi di tahap awal. Upaya ini diiringi dengan langkah strategis membangun sistem pelayanan berbasis digital secara bertahap, sehingga pelayanan publik mulai bertransformasi menuju model yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat, fokus diarahkan untuk mendorong munculnya inovasi lokal yang didasarkan pada hasil pemetaan potensi dan permasalahan desa yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, sehingga masyarakat mampu berperan aktif dalam pembangunan wilayahnya. Dengan demikan, tahap ini menjadi titik awal menuju pelayanan berbasis digital dan masyarakat desa yang lebih berdaya dan inovatif.

Tahap III – Tahun 2028:

Memasuki tahap ketiga, menjadi fase transformasi dimana fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui peningkatan pelayanan berbasis digital secara lebih luas. Aparatur kecamatan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan transformasi digital, sehingga pelayanan dapat berlangsung lebih cepat, transparan, akuntabel, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan potensi lokal yang lebih produktif melalui inovasi yang berkelanjutan serta penguatan kolaborasi lintas sektor, baik dengan instansi pemerintah, dunia usaha, maupun komunitas masyarakat.

Dengan demikian, tahap ketiga diharapkan terjadi percepatan dalam pencapaian pelayanan publik yang lebih berkualitas dan berorientasi digital, serta mendorong terwujudnya masyarakat desa yang semakin berdaya, kreatif, dan memiliki keunggulan kompetitif melalui inovasi dan pengembangan potensi lokal secara berkelanjutan.

Tahap IV – Tahun 2029:

Tahap keempat merupakan fase pematangan, dimana fokus diarahkan pada penguatan implementasi pelayanan publik berbasis digital yang telah berjalan pada tahap sebelumnya. Pada fase ini, pelayanan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat, mudah, dan transparan, tetapi juga memastikan keberlanjutan serta peningkatan kualitas layanan yang semakin konsisten dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal semakin diperkokoh melalui inovasi dan kolaborasi yang semakin erat, sehingga mampu memberikan dampak sosial-ekonomi yang signifikan. Dengan demikian, tahap ini bukan hanya memperkuat kualitas layanan publik, tetapi juga mendorong lahirnya kemandirian dan keberdayaan masyara kat secara lebih berkelanjutan.

Tahap V – Tahun 2030:

Tahun 2030 merupakan tahap akhir dari periode Renstra Kecamatan Pacet Tahun 2025-2029, dimana tahap ini menjadi fase keberlanjutan. Pada tahap ini, pelayanan publik digital diproyeksikan sudah berjalan secara utuh, konsisten dan berkesinambungan untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga dan mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, dengan kepuasan masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan. Upaya peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana prasarana, dan inovasi pelayanan dikembangkan menjadi sistem yang berkelanjutan. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat diarahkan pada penguatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor yang berorientasi pada kemandirian, keberlanjutan, serta peningkatan daya saing wilayah. Tahap ini menjadi puncak dari seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan yang dilalui selama lima tahun, sekaligus pintu gerbang untuk melanjutkan Pembangunan.

3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Pacet dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pacet Tahun 2025-2029

Kebijakan adalah Langkah yang diambil oleh perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Peningkatan pelayanan publik yang responsif, adaptif, transparan, akuntabel dan berbasis digital berorientasi pada kepuasan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan berikut ini disajikan tabel Teknik merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD :

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pacet

No	Sasaran RPJMD yang Relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan berbasis potensi lokal	Peningkatan pelayanan publik yang responsif, adaptif, transparan, akuntabel dan berbasis digital berorientasi pada kepuasan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan	

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Pacet,2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Rencana strategis Kecamatan Pacet tahun 2025-2029 didasarkan pada Inmen (Instruksi Menteri) Nomor 2 Tahun 2025 . Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama lima tahun ke depan.

Sesuai dengan visi dan misi, strategi dan kebijakan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, maka Kecamatan Pacet mempunyai 6 (enam) Program, program – program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelanggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk lebih jelasnya dalam merumuskan program/kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pacet 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Renstra PD

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Laju IKM		Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017
			Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. 2. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian Aplikasi Surabi oleh Bagian Organisasi dan Laporan Hasil Penilaian Manajemen Risiko oleh Inspektorat
				Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP oleh Inspektorat
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA-SKPD		Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Terselenggaranya Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen
							Administrasi Keuangan yang harus disusun x 100%

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				Terlaksananya Administrasi BMD	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD yang telah disusun sesuai ketentuan /Jumlah Dokumen Administrasi BMD yang harus disusun x 100%
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi	Rekonsiliasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang telah disusun / Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang harus disusun x 100%
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi / Jumlah Dokumen Pelayanan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Daerah	Milik Daerah	Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah yang harus dipenuhi x 100%
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik / Jumlah Aset Barang Milik Daerah x 100%
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Lapangan	dan Perizinannya		Perizinannya
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i
			Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah		Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan : Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan x 100%
				Terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	jumlah pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan/jumlah kegiatan yang direncanakan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan x 100%
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Terselenggaranya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang terlaksana/ Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
				Terselenggaranya urusan pelimpahan kepada camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana / Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
			Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina : Dibagi Jumlah Keseluruhan Lembaga Kemasyrakatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			pemberdayaan masyarakat				Desa dan Kelurahan x 100%
				Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana/ Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang direncanakan x 100%
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
				Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi dan Dibina	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi/ Jumlah fasilitasi Lembaga kemasyarakatan yang direncanakan x 100%
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
							Kapasitasnya
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
				Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan/ Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
				Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
					antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat	antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
				Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
				Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
				Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
				Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib		Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah koordinasi penegakkan perda yang berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan : Jumlah koordinasi penegakkan perda yang direncanakan berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan x 100%
				Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana/ Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
				Terselenggaranya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan/ Jumlah koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
							Peraturan Kepala Daerah yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
			Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan		Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan : Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum yang direncanakan x 100%
				Terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah/ Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
							Negara Kesatuan Republik Indonesia
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
				Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
				Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional
				Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan		Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pelaksanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa : Jumlah perencanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa
				Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina dan diawasi/Total jumlah desa x100%

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Pacet, 2025

Tabel 4. 2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01 - KECAMATAN				5.659.410.483		5.346.238.000		5.454.738.000		5.509.644.250		5.718.669.250	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.741.988.000		4.712.988.000		4.712.988.000		4.712.988.000		4.712.988.000	S 3.1
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	35,26	40	4.741.988.000	44	4.712.988.000	48	4.712.988.000	52	4.712.988.000	56	4.712.988.000	
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	0	60		61		62		63		64		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				43.000.000		56.000.000		56.000.000		56.000.000		56.000.000	
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	43.000.000	2	56.000.000	2	56.000.000	2	56.000.000	2	56.000.000	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1		5		5		5		5		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		3		3		3		3		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		3		3		3		3		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		3		3		3		3		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2		4		4		4		4		
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	10.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.000.000	3	9.000.000	3	9.000.000	3	9.000.000	3	9.000.000	
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				10.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	10.000.000	3	9.000.000	3	9.000.000	3	9.000.000	3	9.000.000	
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	1.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	1.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.012.825.000		4.012.825.000		4.012.825.000		4.012.825.000		4.012.825.000	
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	4.012.825.000	1	4.012.825.000	1	4.012.825.000	1	4.012.825.000	1	4.012.825.000	
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	6	4		4		4		4		4		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	238	252		252		252		252		252		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.006.825.000		4.006.825.000		4.006.825.000		4.006.825.000		4.006.825.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	238	252	4.006.825.000	252	4.006.825.000	252	4.006.825.000	252	4.006.825.000	252	4.006.825.000	
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	
7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	6	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Terlaksananya Administrasi BMD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20	23	5.000.000	23	10.000.000	23	10.000.000	23	10.000.000	23	10.000.000	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0		18		18		18		18		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20	23		23		23		23		23		
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	18	5.000.000	18	5.000.000	18	5.000.000	18	5.000.000	
7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20	23	2.500.000	23	2.500.000	23	2.500.000	23	2.500.000	23	2.500.000	
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20	23	2.500.000	23	2.500.000	23	2.500.000	23	2.500.000	23	2.500.000	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				194.772.500		181.772.500		181.772.500		181.772.500		181.772.500	
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	194.772.500	2	181.772.500	2	181.772.500	2	181.772.500	2	181.772.500	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0		20		20		20		20		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.500.000		13.500.000		13.500.000		13.500.000		13.500.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	13.500.000	1	13.500.000	1	13.500.000	1	13.500.000	1	13.500.000	
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0		0		0		0		0	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0	0	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				115.772.500		97.772.500		97.772.500		97.772.500		97.772.500	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2	115.772.500	2	97.772.500	2	97.772.500	2	97.772.500	2	97.772.500	
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				46.890.500		23.890.500		23.890.500		23.890.500		23.890.500	
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	46.890.500	1	23.890.500	1	23.890.500	1	23.890.500	1	23.890.500	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1		4		4		4		4		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1		
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	30.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				16.890.500		16.890.500		16.890.500		16.890.500		16.890.500	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	16.890.500	4	16.890.500	4	16.890.500	4	16.890.500	4	16.890.500	
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		0		0	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				363.500.000		348.500.000		348.500.000		348.500.000		348.500.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	363.500.000	12	348.500.000	12	348.500.000	12	348.500.000	12	348.500.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	1		1		1		1		1		
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	20.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				341.000.000		321.000.000		321.000.000		321.000.000		321.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	341.000.000	12	321.000.000	12	321.000.000	12	321.000.000	12	321.000.000	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				73.000.000		77.000.000		77.000.000		77.000.000		77.000.000	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	73.000.000	1	77.000.000	1	77.000.000	1	77.000.000	1	77.000.000	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5		5		5		5		5		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	7		6		6		6		6		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0		2		2		2		2		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				58.000.000		58.000.000		58.000.000		58.000.000		58.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	7	58.000.000	6	58.000.000	6	58.000.000	6	58.000.000	6	58.000.000	
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				423.422.483		353.750.000		462.250.000		517.156.250		726.181.250	S 3.1
Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat (%)	100	100	423.422.483	100	353.750.000	100	462.250.000	100	517.156.250	100	726.181.250	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				26.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000	
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	26.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				13.000.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	1	13.000.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13.000.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	13.000.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				26.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000	
Terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	26.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				13.000.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000	
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	13.000.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				13.000.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	13.000.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				25.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terselenggaranya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	1	1	25.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				25.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	1	1	25.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				346.422.483		317.750.000		426.250.000		481.156.250		690.181.250	
Terselenggaranya urusan pelimpahan kepada camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	4	2	346.422.483	12	317.750.000	12	426.250.000	12	481.156.250	12	690.181.250	
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				346.422.483		317.750.000		426.250.000		481.156.250		690.181.250	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	4	2	346.422.483	12	317.750.000	12	426.250.000	12	481.156.250	12	690.181.250	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				171.000.000		93.000.000		93.000.000		93.000.000		93.000.000	S 3.1
Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina (%)	100	100	171.000.000	100	93.000.000	100	93.000.000	100	93.000.000	100	93.000.000	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				46.000.000		33.000.000		33.000.000		33.000.000		33.000.000	
Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	1	1	46.000.000	1	33.000.000	1	33.000.000	1	33.000.000	1	33.000.000	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3	1		2		2		2		2		
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				13.000.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	13.000.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				13.000.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000	
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	1	1	13.000.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3	1	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				50.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	1	50.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	2	1		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				20.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	2	1	20.000.000	2	9.000.000	2	9.000.000	2	9.000.000	2	9.000.000	
7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan				0		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				20.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	1	20.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
7.01.03.2.03.0005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				75.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	0	50	75.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	0	50		50		50		50		50		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	0	50		50		50		50		50		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	0	50		50		50		50		50		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0	50		50		50		50		50		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	0	50		50		50		50		50		
7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				15.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	0	50	15.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	
7.01.03.2.06.0005 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				10.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	0	50	10.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				10.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	0	50	10.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	
7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				10.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	0	50	10.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				15.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	0	50	15.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	
7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				15.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0	50	15.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				70.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	S 3.1
Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	70.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				50.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	1	50.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara				30.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	1	30.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				20.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1	1	20.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				20.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terselenggaranya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	2	2	20.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				20.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	2	2	20.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				130.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000	S 3.1
Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	130.000.000	100	95.000.000	100	95.000.000	100	95.000.000	100	95.000.000	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				130.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000	
Terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	500	200	130.000.000	400	95.000.000	400	95.000.000	400	95.000.000	400	95.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)												
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	1		4		4		4		4		
	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	400	20		400		400		400		400		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				50.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	400	20	50.000.000	400	25.000.000	400	25.000.000	400	25.000.000	400	25.000.000	
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	500	200	50.000.000	400	40.000.000	400	40.000.000	400	40.000.000	400	40.000.000	
7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	1	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				123.000.000		61.500.000		61.500.000		61.500.000		61.500.000	
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan,	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	123.000.000	100	61.500.000	100	61.500.000	100	61.500.000	100	61.500.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan													
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				123.000.000		61.500.000		61.500.000		61.500.000		61.500.000	
Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga (Dokumen)	1	1	123.000.000	1	61.500.000	1	61.500.000	1	61.500.000	1	61.500.000	
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	1		1		0		1		0		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	1		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	13	13		1		1		1		1		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				20.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	1	20.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				20.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	13	13	20.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				5.000.000		5.000.000		0		5.000.000		0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	0	0	1	5.000.000	0	0	
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				40.000.000		20.000.000		25.000.000		20.000.000		25.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	1	40.000.000	2	20.000.000	2	25.000.000	2	20.000.000	2	25.000.000	
7.01.06.2.01.0014 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				13.000.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000	
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga (Dokumen)	1	1	13.000.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	1	6.500.000	
7.01.06.2.01.0015 - Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				10.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				15.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	15.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Pacet, 2025

Ket :

S.3.1 = Program yang Mendukung Sasaran KDH : Meningkatnya kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien

4.2 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program yang telah dirancang ini selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan kegiatan yang lebih terarah. Kecamatan Kertasari yang memiliki peran dalam mewujudkan visi Kabupaten Bandung melalui misi ke 3 yaitu "Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel" telah memetakan subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah. Adapun daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagai berikut.Tanpa ada dukungan dari Kegiatan dan Sub Kegiatan program prioritas Pembangunan daerah tidak dapat berjalan dengan baik berikut ini daftar Sub Kegiatan prioritas yang mendukung Program prioritas Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Pacet, 2025

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU Kecamatan Pacet

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerahkepada masyarakat.

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Keca matan Pacet Tahun 2025-2029 dirumuskan secara sistematis melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan dan terukur. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja.

Berdasarkan indikator kinerja Kecamatan yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kedalam Rencana Strategis Kecamatan Pacet, diidentifikasi indikator kinerja yang bernilai strategis dan memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan performa kinerja Kecamatan Kertasari. Indikator Kinerja tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pacet yaitu.

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pacet

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	0.11	0.15	0.26	0.39	0.56	0.68	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Pacet, 2025

Penetapan Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai IKU dimaksudkan untuk memberikan ukuran yang jelas, terukur, dan berbasis data dalam menilai kinerja pelayanan publik. IKM mencakup berbagai

aspek layanan, antara lain kecepatan, ketepatan, keramahan, kemudahanprosedur, serta kepastian biaya dan waktu pelayanan. Oleh karena itu, laju peningkatan nilai IKM menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana pelayanan publik Kecamatan Pacet memenuhi ekspektasi dan kebutuhan masyarakat.

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 - 2029 melalui IKK

Dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, pengyukuran kinerja menjadi salah satu aspek yang sangat krusial. Namun pada Tingkat Kecamatan, masih terdapat tantangan signifikan, salah satunya adalah belum tersedianya Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terstruktur dan terstandarisasi. Ketiadaan IKK ini menyebabkan sulitnya melakukan evaluasi kinerja secara obyektif, serta membatasi kemampuan untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan Kecamatan berdampak langsung terhadap Masyarakat. Berikut ini tabel yang menjelaskan tentang Indikator kinerja kunci.

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Pacet

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	0.11	0.15	0.26	0.39	0.56	0.68	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Pacet, 2025

Sebagai IKK, Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tidak hanya mencerminkan hasil dari proses pelayanan publik, tetapi juga menjadi tolak ukur untuk mengevaluasi efektivitas implementasi strategi peningkatan kualitas layanan. Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggambarkan sejauh mana layanan yang disediakan memenuhi harapan masyarakat, baik dari sisi ketepatan waktu, kemudahan prosedur, kualitas interaksi petugas, hingga kepuasan secara keseluruhan.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kecamatan Pacet periode 2025 – 2029 merupakan dokumen yang disusun oleh Kecamatan Pacet dalam rangka optimalisasi pencapaian target kinerja yang diukur dari Indikator Kinerja Utama dan juga sebagai rangkaian proses perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Pacet dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Renstra-PD Kecamatan Pacet tahun 2025- 2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025- 2029. Selain itu, penyusunan Perubahan Renstra mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pelaksanaan Renstra-PD Kecamatan Pacet Tahun 2025–2029 perlu dilandaskan pada kaidah-kaidah strategis yang menjamin arah kebijakan dapat diterjemahkan menjadi tindakan yang terukur, berorientasi hasil, dan berdampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat diukur melalui kepuasan masyarakat. Sebagai simpul koordinasi antar pemangku kepentingan kewilayahan, pelaksanaan Renstra-PD Kecamatan Pacet harus mengedepankan prinsip sinergi dan kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan desa, perangkat daerah teknis, dan unsur masyarakat. Tata kelola yang dibangun harus responsif dan adaptif terhadap kebutuhan warga serta perkembangan regulasi. Dalam kerangka tersebut, pengambilan keputusan harus berbasis pada data yang akurat dan valid.

Selain itu, pelaksanaan Renstra-PD harus responsif terhadap isu-isu strategis baik di tingkat lokal maupun nasional, seperti kesenjangan akses layanan publik, penguatan ketertiban umum, serta tuntutan reformasi birokrasi. Seluruh proses ini wajib dilaksanakan secara akuntabel dengan menjamin keterbukaan informasi dan pelaoran kinerja secara berkala.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Konsistensi antara kebijakan dalam perencanaan strategis dengan hasil rencana pembangunan daerah khususnya rencana capaian kinerja jangka menengah di Kecamatan Pacet perlu dievaluasi untuk mengukur sejauh mana keberhasilan Kecamatan Pacet dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pengendalian dan evaluasi perencanaan dilakukan terhadap perumusan kebijakan strategis, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pacet.

Evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan supervisi yang dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan jangka menengah yang tertuang pada Renstra Kecamatan Kecamatan Pacet tahun 2025-2029. Hal itu bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung dilaksanakan melalui Renstra-PD Kecamatan Pacet sesuai tugas pokok dan fungsinya sehingga dari hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja Kecamatan Pacet sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan rencana strategis periode berikutnya. Beberapa hal yang menjadi fokus dalam evaluasi pelaksanaan Renstra-PD mencakup:

1. Evaluasi terhadap kebijakan Renstra-PD.
2. Analisis terhadap capaian kinerja organisasi yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).
3. Analisis terhadap capaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.
4. Analisis terhadap faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja.

Sebagai dokumen perencanaan strategis, Renstra-PD tidak hanya menjadi acuan internal Kecamatan Pacet dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah (Renja-PD) selama tahun 2025-2029, tetapi juga dapat menjadi referensi dalam pengambilan keputusan bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Kecamatan Pacet, termasuk pemerintah desa, perangkat daerah teknis, lembaga kemasyarakatan, dan mitra lainnya.

Soreang, September 2025

CAMAT PACET

Ttd

ASEP SUSANTO

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pendidikan Pegawai Kecamatan Pacet 20

Tabel 2. 2 Golongan Pegawai Kecamatan Pacet.....20

Tabel 2. 3 Sarana dan Prasarana Kecamatan Pacet 21

Tabel 2. 4 Hasil Rekonsiliasi Aset Periode 1 Januari – 31 Desember 2024 21

Tabel 2. 5 Rekapitulasi Jumlah Penduduk 25

Tabel 2. 6 Rekapitulasi Tingkat Pendidikan Kecamatan Pacet 25

Tabel 2. 7 Rekapitulasi Anak Usia 0-17 Tahun.....26

Tabel 2. 8 Jumlah dan Rata-Rata Laju Pertumbuhan Tahun 2019-2025.....26

Tabel 2. 9 Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2026-2029 27

Tabel 2. 10 Rincian Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan 28

Tabel 2. 11 Target, Realisasi dan Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pacet Tahun 2021 – 2025 30

Tabel 2. 12 Target, Realisasi dan Capaian Anggaran 33

Tabel 2. 13 Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Bandung 55

Tabel 2. 14 Pemetaan Permasalahan Kecamatan Pacet.....57

Tabel 2. 15 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Pacet 60

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pacet 66

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Kecamatan Pacet 67

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pacet 70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur organisasi.....19

Gambar 2. 2 Peta Administrasi Kecamatan Pacet 24

Gambar 2. 3 Cascading Misi Pembangunan 3 51